

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan hutan rakyat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang melalui beberapa program kegiatan antara lain:
 - a. Sosialisasi dan penyuluhan untuk pembangunan hutan rakyat dan rehabilitasi lahan kritis di lahan milik. Strategi ini telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu formal dan informal. Metode formal dilaksanakan dengan format pertemuan seperti seminar dan pelatihan yang di dukung oleh alokasi APBD, sementara metode informal dilaksanakan oleh Penyuluh Kehutanan Lapangan melalui kegiatan anjongsana/*door to door* kepada tiap petani hutan rakyat di tiap daerah.
 - b. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan hutan rakyat dengan *output* aktifnya kelompok tani pengelola hutan rakyat. Strategi ini telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang dengan pemberian bantuan seperti bibit dan kegiatan pembuatan sipil teknis di lahan hutan rakyat. Semua bantuan disalurkan kepada

Kelompok Tani Hutan Rakyat dalam rangka untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, serta membangun kesepahaman dalam mengelola hutan rakyat secara bersama.

c. Pelatihan dan adopsi teknologi pengelolaan hutan rakyat.

Strategi ini telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang bertujuan untuk meningkatkan wawasan petani dalam mengelola hutan rakyat. Jenis pelatihan yang diberikan kepada petani meliputi teknis pengelolaan hutan rakyat mulai dari penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan pemasaran. Selain itu juga ada pelatihan mengenai pembentukan koperasi bagi kelompok tani. Adanya alokasi APBD menjadi pendukung utama dilaksanakannya pelatihan dan adopsi teknologi bagi petani.

d. Pembentukan Unit manajemen Hutan Rakyat (UMHR) sebagai

basis pengembangan dalam pengelolaan hutan rakyat. Strategi ini telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang beranggotakan kelompok tani. Dengan adanya UMHR pengelolaan hutan rakyat menjadi lebih terorganisir dan telah mendapatkan hasil yang baik yaitu mendapat sertifikat pengelolaan hutan lestari. Namun, pembentukan UMHR belum merata di semua wilayah Kabupaten Jombang dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan strategi pengembangan hutan rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung:

1. Dukungan alokasi APBD dan APBN (Dana Alokasi Khusus Kehutanan) untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan. Ada beberapa kegiatan yang didanai lewat APBD, diantaranya Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan, Pembinaan. Selain itu juga terdapat alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) yang merupakan alokasi dana dari APBN. Dana tersebut berfokus pada penyediaan bibit tanaman, pemeliharaan lahan, dan pembuatan bangunan sipil teknis.
2. Kesadaran masyarakat untuk mau bekerja sama dalam pengelolaan hutan rakyat secara arif.
3. Keberadaan penyuluh kehutanan yang berperan sebagai penghubung komunikasi antara Pemerintah dengan petani hutan rakyat. Salah satu faktor pendukung yang telah dilakukan oleh Dishutbun Kab Jombang adalah dengan membentuk sejumlah satuan unit kerja kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Setelah pengorganisasian, kemudian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan unit satuan kerja yang dibentuk.

b. Faktor Penghambat:

1. Waktu pelaksanaan program kegiatan yang disesuaikan dengan datangnya musim penghujan dan berdekatan dengan akhir tahun anggaran. Waktu pelaksanaan kegiatan yang bertepatan dengan musim hujan dan mengakibatkan waktu pelaksanaan menjadi lebih singkat dapat diatasi dengan beberapa perubahan rencana dan strategi. Perubahan rencana tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: membentuk organisasi baru yang sedang berkembang dan memikirkan kembali tujuan dan sasaran yang diprioritaskan.
2. Regulasi Terkait Penatausahaan Hasil Hutan. Dinas perlu mengoptimalkan peran penyuluh kehutanan di lapangan. Setiap anjungsana yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan harus senantiasa diberikan materi mengenai penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Dengan harapan agar setiap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat selalu termonitor dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran terkait dengan strategi pengembangan hutan rakyat, yaitu :

1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang harus dapat meningkatkan sumberdaya dengan cara melibatkan

instansi, masyarakat, dan SKPD yang lain untuk dapat melaksanakan program kegiatan sebelum datangnya musim hujan dan Dishutbun harus dapat membuat strategi alternatif apabila program tersebut belum selesai/ tidak sesuai dengan musim yang berlangsung.

2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang harus dapat mengoptimalkan peran penyuluh kehutanan di lapangan dengan harapan setiap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat selalu termonitor dengan baik.

